

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN MENURUT
PASAL 149 KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
(S.Sy)



OLEH

**HENDRI RINALDI
10621003691**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru)

Menurut Ajaran Islam melangsungkan perkawinan berarti ibadah, jika hubungan perkawinan antara suami istri tidak mungkin diteruskan, maka diperbolehkan perceraian. Meskipun demikian harus terdapat alasan-alasan yang kuat untuk terlaksananya tujuan perceraian tersebut, dan hak cerai hanya dapat digunakan dalam keadaan yang sangat memaksa (*genting*), dan apabila terjadi perceraian maka Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan tempat menerima, mengadili, memutus dan menyelesaikan masalah perkawinan, dan Pengadilan dalam memutuskan perkara Perceraian yakni menurut ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana hasil putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak-hak istri pasca perceraian, bagaimana penerapan pasal 149 KHI dalam melindungi hak-hak mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dan bagaimana analisa hukum Islam terhadap putusan tentang perlindungan hak-hak istri pasca perceraian di pengadilan agama Pekanbaru

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang 149 KHI yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2011. Adapun jumlah kasus sebanyak 370 kasus kemudian dibagi 10%, dan penulis mengambil sampel beberapa putusan yakni sebanyak 37 kasus tentang hak-hak istri pasca perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini adalah Observasi, Interview dan Studi Dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini, diketahui bahwa dalam memutuskan kasus cerai thalak hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru ada yang memutuskan dengan *Verstek* dan dengan putusan *Deklatoir*, kemudian Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru secara garis besar terbagi pada dua kategori yakni ada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut yang melindungi hak-hak mantan istri diantaranya hak nafkah, *muta'h*, mahar dan *hadhanah* seperti yang diamanatkan dalam pasal 149 KHI dan ada yang belum melindungi hak-hak istri sesuai dengan pasal 149 KHI

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang.

Penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan hak-hak Istri pasca perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru)”** tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta Ernawati sebagai motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran untuk membimbingku sampai sekarang. Kemudian untuk Ayahku Amri S.pd, doaku akan selalu untukmu.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. M. Nazir, M.A. Bapak Prof. DR. H.M Nazir Karim, MA Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

4. Bapak Ketua Jurusan Ahwal Al-Sykhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Drs. Yusran Sabili, M.Ag, Sekretaris Jurusan, Bapak Zainal Arifin, M.Ag, dan Bapak Penasehat Akademis Hairul Amri, M.Ag, yang telah membantu terlaksananya skripsi ini..
5. Ibu dosen Dra. Sofia Hardani. MA. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan lebih bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa yang intelek.
7. Bapak kepala Perpustakaan al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
8. Kepada seluruh keluarga besar terkhusus untuk Adikku tercinta Eva tri eri yanti dan Tia nanda oktoviani serta orang special dalam hidupku Astri Wahyuni, Terima kasih atas motivasinya.
9. Buat bapak Drs. Johari M.A. yang menjadi tempat curahan permasalahan dan membimbing skripsiku, terima kasih yang tak terhingga untuk bapak, semoga allah membalas semuanya.
10. Untuk sahabat-sahabat penulis Tengku syafrizal, M.yazid, eri, M.hidayat S.sy. Imron Rosyadi, dan Syamsuardi serta teman-teman angkatan '06 yang telah menemani dan mau mendengarkan curhatanku ketika sedih

maupun senang, dan juga mengajarkan apabila ada perkuliahan yang tidak dipahami serta semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Yang terakhir untuk teman-teman Jurusan Ahwal al-Syakhsyah Ari cantona, Abdul syukur, yenita S.sy., Alfi Syukri S.sy., dan semua teman yang berpartisipasi dalam kehidupan saya. dan Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT sebagai suatu amal sholeh dan kepada-Nya kita berserah diri, semoga mendapat ridho-Nya , amin ya rabbal'alamin.

Pekanbaru, 17 Mei 2013

Penulis,

Hendri Rinaldi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Outline	11
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Pengadilan agama Pekanbaru.....	13
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	16
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru	18
D. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru	19
BAB III PEMBAHASAN TENTANG HAK-HAK ISTRI	
PASCA PERCERAIAN	
A. Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi hukum Islam	22
B. Sebab terjadinya Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam	24
C. Hak-hak Istri Pasca Perceraian menurut pasal 149	
KHI	34
D. Sebab-sebab Istri tidak mendapatkan hak-haknya	
menurut KHI	48

BAB IV PEMBAHASAN/ HASIL PENELITIAN

A. Hasil Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hak-Hak Istri Pasca Perceraian	51
B. Penerapan Pasal 149 KHI Terhadap Perlindungan Hak-Hak Istri di Pengadilan Agama Pekanbaru.	59
C. Analisa Kompilasi hukum Islam terhadap Pelindungan hak-hak Istri di Pengadilan Agama Pekanbaru	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, kata perkawinan lebih dikenal dengan nikah, sedangkan menurut ajaran Islam melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan ibadah, dan melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Oleh sebab itu Rasulullah memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk kawin dan hidup berumah tangga, karena perkawinan akan memelihara dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Sabda Rasulullah SAW:

مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ
لِلْبَصَرِ وَأَحْمَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

(

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang telah mampu kawin, maka hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya kawin itu akan menundukkan pandanganmu dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu baginya laksana perisai dan obat baginya. (H.R. Bukhari).¹

¹ Imam abi abdillah Bukhari al ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut :Daarul kitab a’lamiyah). juz ke-5. H. 438, no. 5066

Islam cukup logis dalam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah antara suami istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar yakni ibadah kepada Allah. Ibadah disini tidak hanya berarti ritual belaka seperti hubungan seksual suami-istri, melainkan pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan.² Oleh sebab itu Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling cinta, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT.

Firman Allah QS. surat Ar-rum (30):21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Ruum.)³

Syariat Islam bertujuan membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan. Namun, apabila karena beberapa alasan lain ternyata tujuan ini gagal, maka tidak perlu lagi memperpanjang harapan hampa

²A Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syaria'h)*, (Jakarta, 2002) cet II h. 151-152

³ Departemen Agama RI, *Al—Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra) h. 644

tersebut sebagaimana yang dipraktekkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamaian diantara kedua suami istri dari pada memutuskan perkawinan mereka. Namun, jika hubungan perkawinan antara suami istri tidak mungkin diteruskan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan sesuatu rantai yang membahayakan, merusak, dan mengakibatkan keadaan yang semakin menyengsarakan dan menyakitkan, maka diperbolehkan perceraian.⁴ Meskipun Islam memperkenankan perceraian, namun harus terdapat alasan-alasan yang kuat untuk terlaksananya tujuan perceraian tersebut, dan hak cerai hanya dapat digunakan dalam keadaan yang sangat memaksa (genting), sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفٍ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَلَالُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.
()

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah thalaq” (H. R. Abu Daud)”⁵

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya cerai tidak lah dikehendaki dalam Islam. Namun, apabila kebahagiaan tidak tercapai dalam kehidupan orang yang menikah, maka satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kesengsaraan itu ialah melalui cerai, oleh sebab itu

⁴ A Rahman I Doi, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasa, 2002) cet II h. 221

⁵ Abu daud sulaiman bin asya's syajastani, *Sunan Abu daud*, (Beirut : Daarul kitab a'robiy), juz ke-2, h. 220.no. 2180

perceraian merupakan upaya terakhir untuk melepaskan seseorang dari penderitaan.

Dalam membicarakan Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia peradilan agama merupakan suatu lembaga “suci” yang mana lembaga ini diakui oleh seluruh komponen bangsa, baik bangsa yang belum maju maupun yang telah maju, di dalam peradilan ini terkandung nilai amar ma’ruf nahi munkar serta menyampaikan hak yang harus menerimanya dan menghalangi orang-orang yang zalim dari berbuat aniaya serta mewujudkan rasa keadilan. Adapun kekuasaan peradilan agama ruang lingkup tugasnya antara lain menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶

Dengan kekuasaan dan wewenang dari Pengadilan Agama dapatlah diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga hukum peradilan keluarga yang mempunyai perkara-perkara di bidang perdata keluarga serta mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda dengan Peradilan Umum.⁷

Dalam praktek sehari-hari di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat berbagai masalah keluarga yang diselesaikan melalui jalur hukum.

Dari berbagai kasus yang ada yang paling dominan dan menduduki posisi

⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta :Sinar Grafika, 2010) cet. Ke-1.h. 1

⁷ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1986) cetII, h. 95

teratas adalah kasus perceraian. Dengan demikian Pengadilan Agama Pekanbaru telah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan kewenangannya

Dan apabila telah terjadi perceraian antara suami-istri, Maka istri mempunyai hak-hak yang harus diberikan oleh si suami berupa mut'ah yaitu baik berupa uang ataupun benda, selanjutnya istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka, maka ia tidak berhak mendapat apa-apa Rasulullah SAW bersabda:

حدثتني فاطمة بنت قيس قالت : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليه الرجعة

(
“Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuknya kembali. ”(HR. Nasa’i).⁸

Dan berkenaan dengan tempat tinggal, Allah SWT berfirman dalam QS. At-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّا تَرْضَوْنَ لَكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُخْفُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”⁹

⁸ Abu abdirrahman ahmad bin syuaib an-nasa’i, Sunan an-nasa’i. (beirut :Daarul Ma’rifah), 1420 H, juz ke-6. H.144.no. 3403

⁹ Departemen Agama RI, *Op-cit*, h. 946

Di samping itu suami harus melunasi hutang maharnya apabila ia masih berhutang karena mahar tersebut adalah hak sang istri. Selanjutnya hak istri adalah menerima biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Dalam KHI Pasal 149 disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁰

Pengadilan Agama telah banyak memutuskan berbagai kasus cerai thalaq berjumlah sebanyak 370 kasus tahun 2011 yang mana penyebabnya kebanyakan karena adanya pertengkaran dan ketidakcocokan antara pasangan suami-istri. Dan adapun pasca perceraian si Istri memiliki hak yang harus ditanggung oleh si Suami seperti: nafkah, tempat tinggal, belanja dan sebagainya, dalam artian suami masih punya kewajiban member nafkah pada mantan istri, akan tetapi hak istri pasca perceraian apakah sudah diberikan

¹⁰ Wahyu widiana. *Kompilasi hukum islam Indonesia*, Jakarta: Direktorat pembinaan peradilan agama, 2003) h .69.

oleh si suami atau tidak dinafkahi sama sekali. Masalahnya apakah Pengadilan Agama sudah melindungi hak-hak istri Menurut Pasal 149 KHI Seperti Contoh **Putusan PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO:826 /Pdt. G/2011 / PA. Pbr.**¹¹ Tgl: 29 Desember 2011 Tentang Cerai Thalak Antara **Jalaluddin** Dengan **Saspa Alenda binti M. Natsir Junjung**. Yang dalam putusan rekonsensi memutuskan:

Mengabulkan Gugatan Penggugat Tersebut.

Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Selama masa Iddah sebesar Rp. 1. 500. 000 (Satu Juta lima Ratus ribu rupiah)dan membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500. 000. (Lima ratus ribu rupiah)dan Nafkah Tertinggal selama 16 bulan sebesar Rp. 2. 500. 000 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).

Menghukum Tergugat Untuk membayar nafkah satu orang anak bernama Dhiva Saskia Ulfa kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 500. 000 [Lima ratus Ribu rupiah] Sampai anak itu dewasa atau mandiri.

Di dalam contoh Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru di atas ada hak-hak istri yg belum dilindungi menurut Pasal 149 KHI, Di mana Dalam contoh putusan tersebut hak mantan istri yg belum dilindungi oleh putusan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah seperti tidak dipenuhinya hak *Maskan dan Kiswah*, Padahal dalam KHI sudah jelas hak istri tersebut harus terpenuhi. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut. Untuk itu penulis mencoba meneliti tentang hak-hak istri pasca perceraian yang terjadi

¹¹ Arsip Pengadilan Agama Pekanbaru. *Salinan Putusan*, Arifin Ahmad. Pekanbaru : PA Pekanbaru ,2011

di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan judul: **“Perlindungan hak-hak Istri pasca perceraian menurut Pasal 149 kompilasi hukum Islam (Studi kasus di pengadilan agama Pekanbaru)”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis membatasi masalah dan ruang lingkup yang akan dibahas adalah mengenai Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri pasca perceraian

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak-hak istri pasca perceraian?
2. Bagaimana Penerapan pasal 149 KHI dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian dipengadilan Agama Pekanbaru?
3. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap putusan tentang perlindungan hak-hak istri pasca perceraian di pengadilan agama Pekanbaru

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui hasil putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak-hak istri pasca perceraian?
2. Untuk mengetahui penerapan pasal 149 KHI dalam melindungi hak-hak Istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan agama Pekanbaru.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang hak-hak istri pasca perceraian dan tentang penerapan pasal 149 KHI di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian yang penulis laksanakan.
3. Sebagai suatu persyaratan untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dokumentasi yaitu meneliti arsip-arsip putusan/salinan putusan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan.

2. Subjek dan objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian ini adalah arsip salinan putusan perkara yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2011
- b. Objek Penelitian ialah studi kasus tentang penerapan pasal 149 KHI oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah putusan tentang 149 KHI yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun jumlah kasus sebanyak 370 kasus, maka penulis mengambil sampel beberapa putusan

kemudian dibagi 10%, jadi jumlahnya sebanyak 37 kasus tentang hak-hak istri pasca cerai yang terdapat di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik yang sudah diketahui sebelumnya.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan terdiri dari:

Data primer diperoleh dari Hakim yang pernah memutuskan perkara cerai thalak, dan dokumen putusan perkara yang ada di pengadilan Pekanbaru tahun 2011.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literature buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. *Observasi* yaitu penulis terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melihat dan memahami serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.
- b. *Interview* yaitu penulis langsung mengadakan wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti: Hakim, panitera dan sebagainya.

- c. *Studi Dokumentasi* yaitu dengan mengakumulasi materi dokumentasi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian menyeleksi materi yang relevan dengan objek kajian.

Metode Analisa data:

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu dengan cara mengklarifikasi data-data berdasarkan persamaan jenis, dan diuraikan sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh untuk masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Outline

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini, penulis mensistematika sebagai berikut:

- Bab Pertama:** Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, batasan masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab Kedua:** Gambaran Tentang Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Serta Tugas Pengadilan Agama Pekanbaru
- Bab Ketiga:** Tinjauan umum tentang Hak-hak istri pasca perceraian yang berisi tentang Pengertian perceraian menurut hukum Islam dan KHI, sebab terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan KHI, serta hak-hak istri pasca perceraian menurut pasal 149 KHI.

Bab Keempat: Analisis Terhadap Putusan Cerai thalak di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam melindungi hak-hak istri pasca Perceraian, terdiri dari Bagaimana hasil putusan Pengadilan agama Pekanbaru pasca perceraian, apa dasar Pertimbangan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan keputusan pada istri sesuai dengan pasal 149 KHI, dan analisis Hukum Islam terhadap putusan tentang perlindungan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bab Kelima: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Sebelum tahun 1958, Propinsi Riau tidak memiliki Pengadilan tinggi Agama dan masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah Padang. Dengan keluarnya peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang tugas Pengadilan Agama, yaitu pada pasal 1 yang mengatur bahwa ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negara harus didirikan pengadilan agama yang daerah hukumnya sama dengan pengadilan Negeri, maka oleh pemuka masyarakat Pekanbaru yang terdiri dari Alim Ulama dan Cerdik pandai dicarilah orang yang dirasa patut dan mampu untuk memimpin Pengadilan agama atau Mahkamah Syari'ah tersendiri di Pekanbaru.¹

Maka terpilih lah KH. Abdul Malik, salah seorang ulama Riau yang menjabat sebagai anggota Mahkamah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Setelah diusulkan ke Jakarta, maka dilantiklah Abdul Malik pada bulan Mei 1958 menjadi Ketua Pengadilan Agama Kotamadya Pekanbaru yang pertama.²

¹ Abbas hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Sewilayah Riau*, Pekanbaru: t. p. , 1995, h.

² *Ibid*

Pengadilan Agama Kotamadya Pekanbaru yang bertempat di jalan Rambutan Nomor 20 Pekanbaru, kemudian melantik pula Abbas Hasan sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada bulan Agustus 1959.³

Pada tahun pertama berdirinya Pengadilan tersebut, boleh dikatakan belum ada menerima perkara yang masuk untuk disidangkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Islam Pekanbaru masih cenderung untuk menyelesaikan perkara kasus mereka seperti perkara perselisihan perkawinan atau thalak ke kantor Urusan Agama. Selain itu, masyarakat Islam Pekanbaru belum banyak mengenal fungsi, kedudukan dan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru. Juga antara Pengadilan Agama dengan pengadilan Negeri masih berebut wewenang tentang lembaga mana yang berhak mengadili, Misalnya perkara waris mawaris.⁴

Namun menurut Tarmizi, SH, salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, masalah waris mawaris merupakan wewenang Pengadilan negeri berdasarkan Statblad 1882 Nomor 152 yaitu Undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.⁵

Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut maka sering kali Keputusan terhambat pelaksanaannya akibat adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Hambatan ini baru teratasi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang

³ *Ibid.* , h. 10.

⁴ *Ibid*

¹⁶ Tarmizi.SH. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, Februari 2013

beragama Islam. Berarti pula bahwa pengadilan Agama berwenang menyelesaikan dan melaksanakan putusannya sendiri tanpa ada campurtangan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri.

Adapun mereka yang pernah menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Pekanbaru adalah antara lain:

KH. Abdul Malik	(1958-1960)
Drs. Abbas Hassan	(1960-1979)
Drs. Amir Idris	(1979-1987)
Drs. Marjohan Syam	(1987-1994)
Drs. Abdurrahman Har	(1994-1998)
Drs. H. Lumban Hutabarat, SH.	(1998-2001)
Drs. Zein Ahsan	(2001-2002)
Drs. H. Harun S. , SH, MH.	(2002-2006)
Drs. H. Taufiq Hamami, SH, MH	(2006-2010)
Drs. H. Firdaus. HM, SH, MH	(2010 -2012)
Drs. Abu Thalib Zisma	(2013.....)

Sedangkan alamat Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berturut-turut adalah sebagai berikut:

Jalan Rambutan No. 20	(1958-1965)
Jalan Riau Lama	(1966-1971)
Jalan Sudirman	(1971-1973)
Jalan Harimau	(1973-1976)
Jalan Kartini	(1976-1985)

Terjadinya perpindahan Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sampai berkali karena Pengadilan Agama belum mempunyai Gedung sendiri, akibatnya Pengadilan terpaksa menumpang pada Kantor Kanwil Pertanian Provinsi Riau, Kanwil Depag, dan bahkan pernah menyewa rumah penduduk.⁶

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

a. VISI

“Terciptanya Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru sebagai lembaga peradilan yang Agung di bumi lancang kuning”. “untuk mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas”

b. MISI

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat
2. Mewujudkan pengadilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang professional
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen serta berkesinambunga
5. Meningkatkan dan memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

⁶ *Ibid. h. 14.*

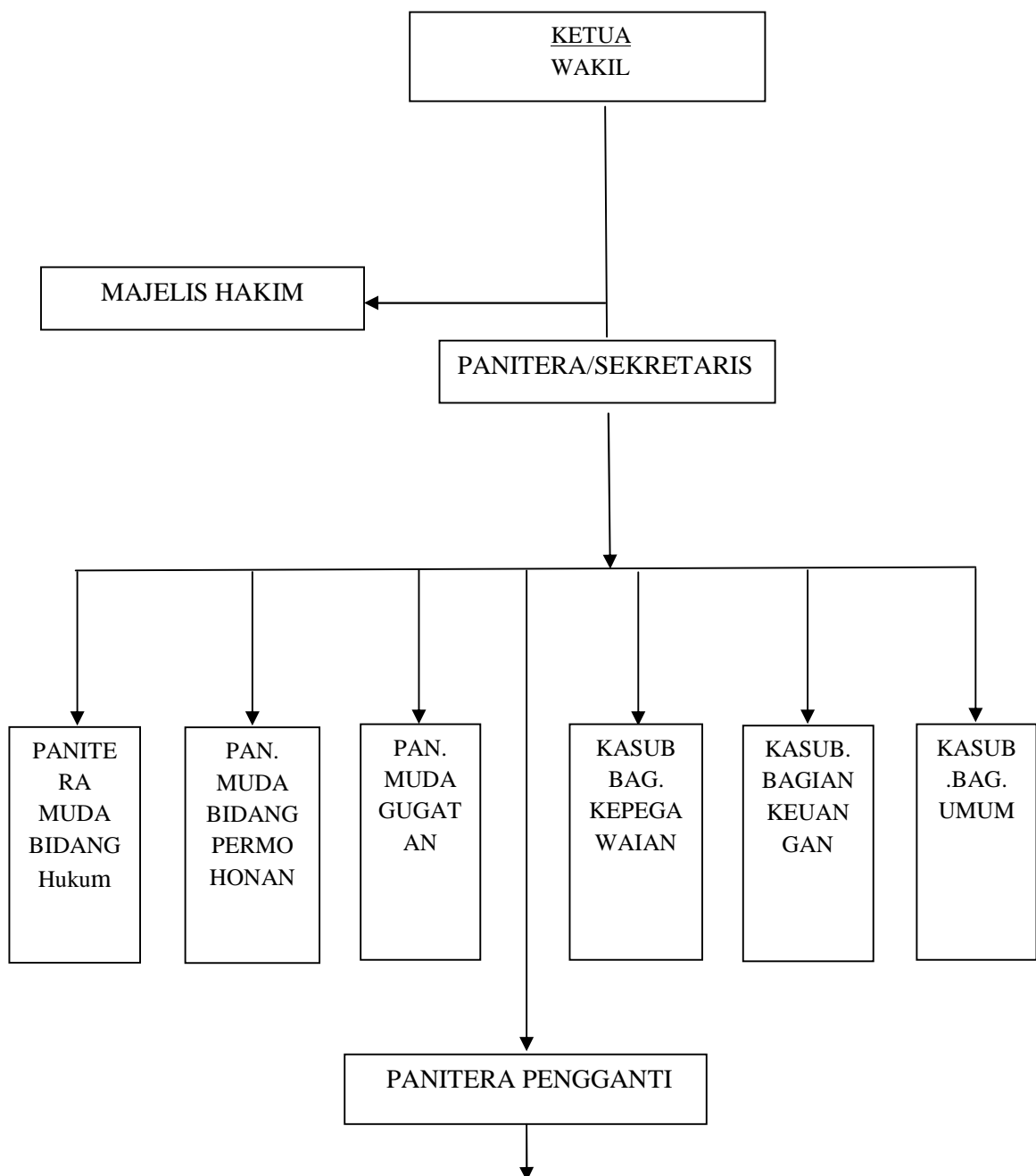
Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1958, susunan organisasi Badan Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, Haki Anggota, Panitera, Sekretaris dan jurusita. Sementara Pasal 10 ayat (1) Undang-undang yang sama menyebutkan bahwa unsur Pimpinan Pengadilan Agama itu adalah Ketua yang dibantu oleh seorang Wakil ketua.

Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1958, disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita. Sedangkan Pasal 38 menegaskan bahwa pada setiap Pengadilan agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Selanjutnya, Pasal 43 Undang-undang yang sama, menggariskan bahwa pada setiap pengadilan agama ditetapkan adanya Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, Sedangkan Pasal 44 mengatur bahwa Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru



D. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Tugas Pengadilan Agama

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan Shadakah

Ayat (2): Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Ayat (3): Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.⁷

2. Wewenang Pengadilan Agama

- a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan Relatif adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik ditingkat pertama, maupun

⁷ Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi I, Medan: Duta Karya, 1995, h. 17.

ditingkat Banding.⁸ Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Kekuasaan relatif ini sangat penting untuk mengetahui kepengadilan manakah seseorang harus mengajukan perkaranya.

Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi wilayah Kota Pekanbaru, Riau.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkatan Pengadilan.

Mengenai kewenangan/kekuasaan Pengadilan Agama dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

Izin Poligami	(Pasal 4 ayat 1)
Izin Kawin bagi yang belum berusia 21 tahun	(Pasal 6 ayat 5)
Dispensasi Kawin	(Pasal 7 ayat 1)
Pencegahan Perkawinan	(Pasal 17 ayat 1)
Penolakan Perkawinan	(Pasal 21 ayat 3)
Pembatalan Perkawinan	(Pasal 25)
Gugatan kelalaian kewajiban suami atau istri	(Pasal 34 ayat 3)
Perceraian karena Thalak	(Pasal 39)
Gugatan Perceraian	(Pasal 40 ayat 1)

⁸ Cik Hasan Bisri, MS. , *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), h. 204.

Penyelesaian harta bersama	(Pasal 35)
Penguasaan Anak	(Pasal 41 sub a)
Biaya Penghidupan istri	(Pasal 41 sub c)
Biaya Pemeliharaan Anak	(Paasal 41 sub c)
Kedudukan anak atas dasar tuduhan zina	(Pasal 44 ayat 2)
Pencabutan kekuasaan orang tua	(Pasal 49 ayat 1)
Penunjukan dan pencabutan kekuasaan wali	(Pasal 53 ayat 2)
Tuntutan ganti rugi atas wali	(Pasal 54)
Penetapan asal usul anak	(Pasal 55 ayat 2)
Pengesahan Kaain Campur	(Pasal 60 ayat 5)
Perkawinan Poligami	(Pasal 65 ayat 2)

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salah satu institusi Pengadilan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Thalak atau *Perceraian* diambil dari kata **إِطْلَاقٌ**, artinya *melepaskan*, atau *meninggalkan*.¹ menurut istilah, Perceraian atau thalak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.²

Menurut Kompilasi hukum Islam Perceraian adalah Ikrar Suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³

Bagi seseorang yang mengetahui hukum-hukum talak meyakini kesungguhan Islam dalam menyelamatkan bahtera rumah tangga. Islam ingin pertalian kedua suami istri tetap terjalin dan tidak putus begitu saja. Hal itu terbukti bahwa disamping membolehkan thalak, islam juga tidak menjadikan keputusan suami mutlak bisa memutuskan jalinan suami istri untuk selamanya dan tidak ada lagi kesempatan bagi keduanya untuk kembali. Akan tetapi Islam memperkenankan perceraian dengan adanya syarat-syarat tertentu dan menjadikannya beberapa kali tahapan.

Allah SWT berfirman QS AL-Baqarah (2): 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. I h. 9.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : P.T. Pena Pundi Aksara, 2009), Cet.I.Jilid ke-III.h. 3

³ M. Ali hasan, *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. I. h. 172.

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi, dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”⁴

Bila seorang suami menjatuhkan thalak pertama atau kedua, maka ia masih berhak untuk rujuk kembali pada istrinya, dan bilamana suami telah menjatuhkan thalaknya untuk yang ketiga kalinya maka si suami tidak boleh rujuk kembali. Ia baru boleh kawin kembali dengan bekas istrinya manakala istrinya telah kawin dengan orang lain. Dibalik aturan itu, Islam ingin mengikis kemarahan pasangan suami istri yang bisa memicu terjadinya perceraian. Kemudian Islam mendorong keduanya untuk mengevaluasi atas kejadian yang telah mereka lalui berdua.⁵ Inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat QS. AT-Thalak(65):1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁶

Maksudnya, bisa jadi suami menyesal setelah mengucapkan kata cerai.

Kemudian suami ada niat dan usaha untuk kembali pada istrinya disamping ia

22 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Jakarta. Mujamma'al-malik fahd li thiba'at al-mush haf. 1971) h..55

⁵ Abdul Azhim Badawi. *Fiqh nikah praktis*, Jawa Barat: Salwa Press, 2008), cet. I. h. 102.

⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.h. 945*

berdo'a kepada allah SWT agar perkawinannya dapat kembali utuh. Jika demikian halnya, maka kemungkinan untuk berdamai lebih besar dan mudah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tegas tidak dinyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (lihat pasal 115).

Dengan demikian perceraian tidak hanya dengan kesaksian dari saksi-saksi, tetapi lebih ketat lagi prosedurnya.

Tata cara perceraian pun di atur sedikian rupa, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 129 yang berbunyi: "Seorang suami yang akan menjatuhkan thalak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."⁷

B. Sebab terjadinya Percerain menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan perceraian terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

⁷ *Ibid.* h. 110

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Suami melanggar taklik thalak.
- g. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Di dalam hukum Islam ada beberapa hal yang menyebabkan putusnya sebuah perkawinan /perceraian yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kematian

Manakala salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya terjadilah perceraian. Dan kalau kebetulan yang meninggal dunia dari pihak suami, si istri dapat kawin lagi dengan laki-laki lain sesudah habis masa i'ddahnya.⁹ Adapun masa i'ddah bagi istri yang ditinggal suaminya apabila ia sedang dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai si bayi yang ada dalam kandungan lahir. Sedang kalau dalam keadaan biasa masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 4 dinyatakan bahwa:

⁸ M. Ali Hasan, *Loc. Cit.*

⁹ Mustafa Kamal. *Fikih Sunnah*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), cet. III. h. 226.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”¹⁰

Dalam surat al baqarah ayat 234 dinyatakan bahwa:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”¹¹

b. Thalaq

Menurut bahasa, Thalaq berarti melepas tali dan membebaskan.¹²

Thalaq dapat jatuh dan menyebabkan terjadinya perceraian apabila dinyatakan oleh suami, baik dalam bentuk kata atau dalam kalimat yang jelas ataupun dengan kalimat sindiran, dengan bahasa lisan atau tertulis, dengan kesengajaan ataupun sekedar bersenda gurau. Dalam bentuk yang terakhir ini Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya sebagai berikut

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثَلَاثُ جَدَهْنِ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةُ) .

Artinya: Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya merupakan kesungguhan dan main-mainnya merupakan kesungguhan yaitu nikah, thalaq, dan rujuk.¹³

¹⁰ Ibid.h. 946

¹¹ Ibid

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2009), Cet. I. h. 255.

³² Muhammad bi yazid al –Qozuwayniy, Sunan ibnu maajah, daarul fikri. Beirut,

Adapun macam-macam thalaq secara garis besar ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, thalaq dibagi menjadi 2 dua macam, yaitu:

1. Thalaq Raj'i

Adalah thalak dimana suami masih mempunyai hak untuk meruju' kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.

2. Thalaq Ba'in

Adalah thalak dimana belum terdapatnya pergaulan suami istri karena adanya bilangan thalak tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti pada khulu'

Dari dua macam tersebut, kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:

a. Dari segi masa iddah, ada:

1. Iddahnya haid atau suci
2. Iddahnya karena hamil
3. Iddahnya dengan bulan

b. Dari segi keadaan suami, ada:

1. Thalaq mati

yaitu thalak yang jatuh disebabkan karena kematian dari suami, bisa jadi waktu itu istri hamil dan tidak hamil

2. Thalaq hidup

Yaitu thalak yang jatuh dimana suami masih dikala hidup, dan bisa jadi istri pada waktu itu hamil atau belum haid ataupun telah haid

c. Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada:

1. Thalaq langsung oleh suami
2. Thalaq tidak langsung, lewat Qadi (Pengadilan agama)
3. Thalaq lewat hakamain Yaitu thalak yang diputuskan oleh juru damai (*hakam*) dari pihak suami maupun istri

d. Dari segi baik tidaknya, ada:

1. Thalaq sunny yaitu thalak yang dijatuhkan ketika istri telah suci dari haidnya dan belum dicampuri
2. Thalaq bid'iy¹⁴

c. Khulu'

Khulu' artinya thalaq yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberi i'wadh atau tebusan karena disebabkan oleh beberapa hal tertentu. Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan istri untuk meminta khulu' seperti kebencian istri terhadap suaminya. Karena ternyata suaminya sorang pezina, pemabuk, penjudi, perampok dan lain-lain.

Dengan demikian khulu' dapat dilakukan kalau ternyata antara suami istri tidak ada persesuaian hidup, dan inisiatif justru datanganya dari pihak istri. Dasar dibenarkannya khulu' ini ada pada QS. Al Baqarah (2):

229

¹⁴ Slamet Iskandar, Drs., Fikih Munakahat, Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, t. t, h. 51

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”¹⁵

Akibat hukum dengan terjadinya khulu’ atau thalaq tebus ini maka istri terthalaq ba’in kecil(Sugra), artinya bila suami menghendaki rujuk kembali ia mesti harus melalui proses perkawinan baru lagi.¹⁶

d. Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang berlangsung kemudian dan membatalkan kelngsungannya perkawinan.¹⁷

Adapun alasan perceraian yang disebabkan fasakh berbeda dengan alasan cerai karena khulu’. Fasakh dapat diajukan oleh pihak wanita/istri kepengadilan agama dengan disertai bukti-bukti yang cukup kuat lantaran karena beberapa sebab, seperti:

- a. Suami mempunyai cacat berupa penyakit yang akut, seperti gila, kusta, epilepsi (ayan).
- b. Suami tak diketahui rimbanya setelah ditunggu selama empat tahun.

¹⁵ DEPAG. *Loc.cit.*

¹⁶ *Ibid* . hal. 229 – 230

¹⁷ Slmet Abidin, *Op.Cit.h.73*.

- c. Suami yang ternyata tidak memenuhi ucapannya yang dinyatakan sebelum kawin seperti mengaku sebagai pegawai negeri, pilot, dokter dan sebagainya, akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu.

e. Syiqoq (Pertikaian)

Bagi suami yang tidak dapat menerima alasan-alasan untuk khulu' sedang keduanya tidak lagi mampu hidup rukun berumah tangga secara ma'ruf maka soal ini akhirnya menjadi syiqoq, artinya perselisihan antara suami istri yang tak mungkin didamaikan, baikm yang tidak bersedia itu dari pihak suami ataupun pihak istri.

Perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan terganggunya hubungan mereka sebagai suatu pergaulan yang ma'ruf, sedang salah satu pihak tidak mau dan tidak terdapat pula alasan – alasan yang bisa membawa ketingkat khulu' atau fasakh, apabila hal ini kemudian diajukan kepengadilan agama maka hakim akan menunjuk dua hakam dari masing – masing pihak istri dan suami, dengan tugas untuk mendamaikannya. Dasar ditunjukkannya dua hakam yang mewakili dua pihak suami istri yang berselisih itu terdapat dalam QS surat Annisa'(4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.”¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit.h.123*.

f. Zhihar

Secara bahasa etimologis (bahasa), kata *zhihar* berarti punggung. Sedangkan menurut istilah, kata *zhihar* berarti suatu ungkapan suami kepada istrinya, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku”, dengan maksud dia mengharamkan istrinya bagi dirinya.¹⁹

Ucapan seperti ini dalam agama Islam sangat dicela dan sangat terlarang. Sebab dengan ucapan seperti ini akan mengakibatkan timbulnya gambaran yang bukan-bukan. Bahkan dengan sikap menyerupakan wajah atau punggung atau badan istrinya dengan ibunya akan timbul kesan sewaktu ia sedang menggauli istrinya, maka yang ada dalam bayangannya bukan berhadapan dengan istrinya melainkan dengan ibunya sendiri, suatu bayangan atau kesan yang amat sangat dicela sekali oleh Allah.

Dalam QS al-mujadalah (58): 2 diterangkan:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

*“Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”*²⁰

Bagi seseorang yang terlanjur berucap kata seperti yang dimaksudkan dengan *zhihar* tersebut, dan tidak dilanjutkan dengan

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), cet. I, h. 327.

²⁰ Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*

menjatuhkan thalak, maka wajib baginya membayar kifarat seperti yang ditunjuk oleh surat al-mujadalah 3-4.

1. Memerdekakan budak, kalau tidak dapat dilaksanakan maka,
2. Berpuasa dua bulan berturut-turut, bila tidak kuasa maka, sebanyak 6-7 ons.

g. Li'an.

Dalam bahasa Arab, kata li'an diambil dari kata *al-la'anu*, yang berarti laknat, hal ini karena pada sumpah yang kelima, suami yang melakukan li'an terhadap istrinya berkata, ". . . *bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berdusta.*"(an-nur(24):7)²¹

Manakala seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, sedang tuduhan tersebut tidak ditunjang oleh saksi yang cukup kuat dan cukup adil maka kepadanya harus disisiksa dengan 80 pukulan. Hal ini dinyatakan dalam QS surat an-nur (24): 4 menyatakan:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik."*²²

Suami yang terkena ancaman siksa delapan puluh kali dera akibat menuduh istrinya yang serupa itu dapat melepaskan diri dari hukuman

101. ²¹ Sayyid sabiq, *Fiqih sunnah*, Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009), Cet. I, jilid 3. h.

²² Departemen Agama RI, *Op.Cit.h.544*

manakala dia melaksanakan li'an, yaitu bersumpah dengan nama Allah bahwa tuduhannya adalah benar. Sumpah seperti itu diulang sampai 4 kali, kemudian diteruskan dengan sumpahnya yang kelima yang berisi bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya bilamana tuduhannya tidak benar(dusta). Hal ini diterangkan dalam QS surat an-nur (24) 6-7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ

الكَاذِبِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta.”²³

Dan seperti halnya suami yang dapat menghindarkan diri dari hukuman menuduh zina tanpa saksi dengan jalan bersumpah, maka istri pun dapat menghindarkan diri dari hukuman dera karena zina dengan cara bersumpah. Sumpah dengan nama Allah itu menyebutkan bahwa tuduhan suaminya tersebut adalah dusta. Ketentuan ini diterangkan dalam QS surat an- Nur (24): 8-9

وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ

أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

“Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-

²³ Departemen Agama RI, *Loc.cit.*

orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.”²⁴

C. Hak-hak Istri Pasca Perceraian menurut pasal 149 KHI

Adapun Hak-Hak Istri Setelah terjadi perceraian menurut KHI dan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Hak Nafkah Maskan dan Kiswah

Secara etimologi kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab النفقة artinya المصروف والانفاق yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang²⁵.

Menurut AmirSyarifuddin, kata nafaqah berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: وقل نقص yang berarti berkurang. Juga berarti وذهب فنى yang berarti hilang atau pergi.²⁶ Bila seseorang dikatakan memberikan nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain.

Namun apabila kata nafqah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Jika isteri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan, seperti makan,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX, 2002), h. 1449.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, Cet. III, 2009), h. 165.

minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam hal ini, isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu²⁷.

Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Dan hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus yang harus diterima oleh isteri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh isteri ternyata benar.²⁸

Isteri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Bagi orang yang mempunyai hak, ia boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, dengan alasan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari :

عن عائشة أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ: أَرَسُو لَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَ لَيْسَ يُعْطِينِي وَ وَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ
قَالَ: خُذْ مَا يَكْفِيكَ وَ وَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخار)

“Dari Aisyah r. a sesungguhnya Hindun Binti ‘Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku, sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya”. Maka Rasulullah SAW. Bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik. (H. R. Bukhari)”²⁹

²⁷ Slamet Abidin. *Op.cit.* h. 174

²⁸ *Ibid.* h. 174

²⁹ Imam abi abdillah Bukhari al ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, Daarul kitab a’lamiyah, juz ke-7 Hlm. 65, no. 5364

Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan isteri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, tempat dan keberadaan manusia.

Dalam kitab *Raudah Nahiyah* disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh isteri, termasuk di dalamnya buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan yang kalau dihidangkan dapat membuat pergaulan rumah tangga menjadi baik, dan akan menimbulkan gangguan atau ketidak harmonisan. Selanjutnya disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya³⁰. Demikian seperti diisyaratkan oleh firman Allah SWT Dalam QS. Al-Baqarah (2): 223

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”³¹

Jadi jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada orang yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Dan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam hari sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi isteri. Demikianlah maksud dari sabda

³⁰ Slamet Abidin. *Op.cit.* h.175

³¹ Departemen Agama RI, *Loc.cit.*

Rasulullah, “*dengan cara yang baik*” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir³². Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya, jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, maka seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab orang-orang seperti ini tidak boleh diserahi harta benda sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’(4):5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

“*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)*”³³

Dengan demikian, jika suami yang berkawajiban memberi nafkah berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah itu tidak sehat, maka wajib menyerahkan kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya.

istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya maka ia berhak mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana pula. Demikian menurut Mazhab Syafi’i

Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal berupa rumah dan peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini juga tidak

³² *Ibid.* h. 176

³³ Departemen Agama RI, *Op.cit.h.115*

menutup kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama antara suami dan istri.

2. Memberikan Mut'ah

Kata mut'ah dan dhammah mim(*mut'ah*) atau kasrah(*mit'ah*) akar kata dari *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi³⁴. Maksudnya materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talaq atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.

Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (qual jidad). Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh segolongan ulama telah menjelaskan kewajibannya, yaitu pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Atha' bin Zaid, Az-Zuhri, An-Nukha'i, At-Taswri, dan Ishaq.

Sebagian ulama berpendapat bahwa mut'ah dalam kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malik, L-Laits, Ibnu Abi Layla, dan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang lama (qual qadim)

Mayoritas ulama beralasan sebagai berikut: *Pertama*, firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2):236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

³⁴ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta:Amzah. 2009) Cet. II. h. 207.

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”³⁵

Firman Allah SWT: Atau kamu menentukan maharnya, maksudnya belum kami tentukan. maknanya selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya. Diantara dalil yang menunjukkan makna tersebut adalah firman Allah setelahnya tentang hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan ditentukan maharnya, yaitu pada QS. Al-Baqarah (2):237

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.”³⁶

Ayat pertama menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi mut'ah, ayat kedua, menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan.

³⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h.58

³⁶ *Ibid.* h. 58

Metode pemahaman dua ayat di atas, firman Allah pada ayat pertama: “*dan berilah mut’ah mereka*” adalah suatu perintah³⁷. Perintah secara hakikat untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainya (qarinah) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran atau lainnya. ketika tidak didapatkan qarinah, perintah disini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. Jadi mut’ah wajib bagi yang tercerai sebelum dicampuri dan dipastikan maharnya. Untuk memperkuat kewajiban mut’ah ditunjukkan dengan firman Allah SWT selanjutnya:

عَلَى الْمُوسِيعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُفْتِرِ قَدْرُهُ مَنَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”³⁸

Kata *ala* yang berarti ‘atas’ pada ayat di atas bermakna kewajiban dan *haqqan* yang berarti ‘pasti’ memperkuat kewajiban dari sisi lafal lain, karena hakikatnya menurut kewajiban. Berdasarkan uraian di atas, penggunaan kata *ala* dan *haqqan* menuntut penguatan atas hukum wajib.³⁹

Kedua, kewajiban mut’ah dalam kondisi ini sebagai pengganti kewajiban, yaitu separuh mahar *mitsil*. Pengganti wajib hukumnya wajib, karena ia menempati di tempat wajib dan memposisikan pada posisinya.

³⁷ Wahhab Sayyed Hawwas *Op. Cit* .h. 209.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*. h. 209

Ketiga, dasar mereka, talaq ini jatuh pada nikah sedangkan nikah menuntut pengganti (*iwad*) yang didapatkan wanita.⁴⁰ dalam kondisi mahar disebutkan baginya separuh mahar yang disebutkan itu jika talaq terjadi sebelum bercampur dan dalam kondisi mahar tidak disebutkan baginya mut'ah sehingga pernikahan ini tidak lepas dari *iwad* (pengganti) bagi wanita.

Golongan pendapat kedua (mut'ah adalah sunnah, tidak wajib) mengambil dalil dari firman Allah SWT:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”*⁴¹

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q. S. Al-Baqarah 241)”*⁴²
Metode pemahaman dua ayat di atas ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang yang berbuat baik dan taqwa, tetapi juga pada yang lainnya. Ketika mut'ah

⁴⁰ *Ibid* .h. 210

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Departemen agama RI. *Loc.cit*.

dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa mut'ah hukumnya tidak wajib.⁴³

2. Kekhususan mut'ah kepada orang-orang yang berbuat baik dan taqwa didasarkan pada kebaikan (ihsan) dan anugerah, kebaikan tidak wajib.

Dalil yang dijadikan dasar bagi pendapat kedua terjawab bahwa kewajiban terhadap orang yang berbuat baik dan taqwa tidak menghilangkan kewajiban terhadap yang lain.⁴⁴ Perbandingannya dengan firman Allah SWT bahwa *Al-Quran menunjukkan kepada orang-orang yang taqwa* (Q. S. al-Baqarah (2): 2) tidak meniadakan bahwa Al-Quran juga menunjukkan kepada manusia seluruhnya, baik dan taqwa, orang yang berbuat baik, dan yang lainnya. Pendapat yang kuat menurut kita adalah pendapat yang pertama karena kuat dalilnya dan selamat dari kontradiksi.

3. Melunasi Mahar

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dianamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin⁴⁵. Pengerian mahar menurut syara' adalah suatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau kelupatan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.

⁴³ Wahhab Sayyed Hawwas *Loc.cit*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Abdul aziz Muhammad Azzam, *op. cit.* , h. 175

“Sesuatu yang wajib” kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena suatu yang ada nilainya atau harganya dijadikan mahar. Sebab nikah artinya suatu yang wajib nikah. “Atau bercampur” maksudnya bercampur secara syubhat⁴⁶. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang wanita yang diduga istrinya atau wanita itu tidur ditempat tidur istri kemudian setelah berhubungan ternyata bukan istrinya tetapi wanita lain. Percampuran seperti ini menggugurkan hukuman dan wajib membayar mahar terhadap wanita tersebut sebab serupa dengan percampuran. Demikian juga wajib membayar mahar jika seseorang menikahi wanita dalam akad yang rusak (*fasid*). Tidak ada bedanya antara berhubungan pada jalan depan atau jalan belakang wanita adam.

“Atau luput dilakukan secara paksa”, seperti seorang laki-laki berpoligami, salah satunya wanita sudah dewasa dan yang lain wanita bayi yang masih dalam susuan. Istri dewasa menyusui istri yang masih bayi tanpa seizin suami, maka istri bayi menjadi putri suami dalam susuan sehingga haram atasnya. Jika benar, suami wajib membayar separuh mahar yang disebutkan kepada istri bayi kecil. Jika tidak benar, wajib membayar separuh *mahar mitsil* dan istri dewasa wajib membayar separuh *mahar mitsil* nya terhadap suami⁴⁷.

Seperti persusuan di atas ralat persaksian para saksi, jikalau mereka menjadi saksi talaq *ba'in* atau persusuan yang diharamkan dan atau

⁴⁶*Ibid.* h. 175

⁴⁷*Ibid*

sumpah *li'an*. Kemudian mereka meralat persaksiannya, mahar seluruhnya diserahkan kepada suami sekalipun belum berhubungan intim.

Dengan demikian, mahar dalam kondisi persusuan diwajibkan kepada seorang laki-laki terhadap perempuan, sedangkan pada contoh kedua kewajiban mahar pada seorang laki-laki terhadap laki-laki⁴⁸.

Pada *fuqaha'* berbeda dalam status mahar apakah sebagai pengganti pemanfaatan suami terhadap organ vital wanita atau ia sebagai penghormatan yang diberikan dari Allah? Al-Bujuri telah mengompromikan dua pendapat ini yang pada intinya, orang yang melihat lahirnya mahar sebagai imbalan pemanfaatan alat seks wanita tersebut bagi yang melihat substansi dan bathin bahwa sang istri bersenang-senang pada suami sebagaimana sang suami juga bersenang-senang pada istrinya, mahar dijadikan sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah yang diberikan suami untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri.

Kewajiban mahar diserahkan kepada suami, bukan kepada istri karena ia lebih kuat dan lebih banya usahanya dari pada istri⁴⁹.

4. Memberikan Biaya Hadhanah Untuk Anak-anaknya

Hadhanah berasal dari kata "*Hidhan*", artinya lambang. Seperti ungkapan:

⁴⁸ Abdul aziz Muhammad Azzam, *op. cit.*, h. 176

⁴⁹ *Ibid.* h. 133

حَضَنَ الطَّيْرُ بَيْضَهُ burung itu mengepit telur yang ada dibawah sayapnya. Begitu pula seorang perempuan (ibu) yang mengepit anak-anaknya⁵⁰.

Para ulama fiqih mendefenisikan *hadanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ,dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusak dirinya baik itu mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara atau mendidik. Maksudnya adlah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebb mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibunya lah yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.

Anak yang masih kecil memiliki hak *hadanah*. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang yang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak

⁵⁰ Aminuddin. *op. cit.* , h. 171

anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Jika hadanahnya dapat ditangani oleh orang lain, misalnya bibi perempuan ia rela melakukannya, sedangkan ibunya tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh menjadi gugur dengan sebab bibi perempuan yang mengasuhnya pun mempunyai hak *hadanah* (mengasuh).

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pengakuan ibu bapaknya, kerana dengan pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik akan dapat membutuhkan jasmani dan akal, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa datang.

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk meng-asuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya.⁵¹ Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak. Karena itu peran ibu sangat penting dalam mengatur kemaslahatan anak.

Dalam sebuah hadis Nabi SAW, dijelaskan:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي⁵² (رواه ابو داود)

⁵¹ Aminuddin. *Loc.cit.*

⁵² Abu daud sulaiman bin asya's syajastani, *Sunan Abu daud*, (Beirut : Daarul kitab a'robiy), juz ke-2, h. 251. No. 2278

“Dari Abdullah Bin Umar r. a bahwa seorang perempuan bertanya, “ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku ia mau mengambilnya dariku. ”Lalu Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah. ”(H.R. Abu Daud)

Kalau ibunya itu menikah dengan orang lain, sedangkan anak itu belum *mumayiz*, maka bapaknya yang lebih berhak mendidik kalau ia meminta atau bersedia mendidiknya. Bila bapaknya tidak ada maka yang berhak mendidiknya adalah bibinya (saudara perempuan ibunya).

Rasulullah SAW. Bersabda:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عُبَيْةٍ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْهِمَا شِئْتَ. فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ. (ر و ا و ابو داود)

“Dari Abu Hurairah r. a. berkata: “pernah aku bersama-sama nabi SAW. lalu datang seorang perempuan dan berkata, “Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya ia telah memberi minum dari sumur Abu Inabah. Dan sesungguhnya ia telah berjasa kepadaku. ”Maka Rasulullah SAW. bersabda, “Berundinglah kamu atas perkara anak itu. ”Maka suaminya betkata, “Siapakah yang berani menghaBilangi aku dengan anak ini?. ”Nabi SAW. bersabda (kepada anak itu):Ini Bapakmu dan ini Ibumu, maka ambillah tangan diantara keduanya yang kamu kehendaki. ”lalu diambilnya tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya. ”(H. R. Abu daud)⁵³

⁵³ *Ibid* h. 251

Hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan mengerti dengan diri *sendiri*, ia boleh memilih siapakah yang akan mengasuhnya. Apakah ibunya atau bapaknya.

Kemudian dalam pasal 149 KHI tersebut yang menjadi hak istri adalah hak nafkah, mut'ah dan mahar, sedangkan hak hadhanah (pemeliharaan anak) adalah hak dari anak itu sendiri yang mana hak tersebut diterimanya sampai ia mumayyiz berumur sebelum 21 tahun.

D. Sebab-sebab Istri tidak mendapatkan hak-haknya menurut KHI

a. Istri yang Nusyuz (Durhaka)

maksud Nusyuz atau durhaka, yaitu enggan dengan tidak berpatutan menurut kemauan atau perintah sah suami, yaitu antara lain:

(a) Apabila menjauhkan dirinya dari suaminya.

(b) Apabila dia meninggalkan rumah suaminya.

(c) Apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah

atau tempat lain tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum Syarak." Sekiranya perkara ini berlaku, suami hendaklah terlebih dahulu mengambil tindakan dengan menasihati isterinya secara baik, jika tidak berjaya suami memulaukan isteri di tempat tidur atau tidur berasingan dan seterusnya kalau isteri masih berdegil dipukul dengan berpada. (al-Quran, an-Nisa', 4: 34)

Hakim boleh menjatuhkan hukuman nusyuz kepada isteri apabila suami bertindak sedemikian dan terbukti isteri bersalah. Hukum isteri nusyuz ialah dia tidak berhak mendapat nafkah. Apabila

isteri bertaubat haknya akan dikembalikan. Sekiranya berlaku perceraian, isteri tetap mendapat hak yang lain seperti muta'ah, pembahagian harta sepencarian sewaktu perkahwinan dan hak penjagaan anak mengikut ketetapan hukum syarak.

b. Istri yang mengajukan gugat cerai

Dalam Kompilasi hukum islam Istri yang meminta cerai diatur dalam pasal 148 yang berbunyi :

- a. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasan.⁵⁴
- b. Pengadilan Agama selambat-lambatnya 1 bulan memanggil tentang istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suaminya untuk mengikrarkan thalaknya didepan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- e. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).

⁵⁴ Djaja S. Meliala. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Bandung. Nuansa Aulia. 2008) cet. 1. h. 115.

- f. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Jadi jika Istri telah menebus dirinya dan suaminya telah memisahkannya, maka dia lebih berhak atas dirinya. Suami tidak lagi berhak merujuknya kecuali dengan seizinnya. Perpisahan ini bukan thalak, sekalipun diputuskan dengan lapaz thalak. *Khuluk* adalah pembatalan akad nikah yang ditempuh demi kemaslahatan wanita dengan membayar *fidyah*.⁵⁵

⁵⁵ Abdul Azhami Badawi, *Op.cit.* h. 113

BAB IV

PEEMBAHASAN/ HASIL PENELITIAN

A. Hasil Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.

Dalam Sub bab ini penulis memuat beberapa kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Cerai thalak, diantaranya Putusan itu adalah sebagai berikut:¹

1. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 807/Pdt. G/2011/PA. Pbr.

Tgl. 18 Maret 2011. Tentang cerai thalak antara **Munarmin bin Bambang, S**, dengan **Sri Hartati Binti Surima** sebagai Tergugat yang memuat Putusan dalam Kompensi:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut.
- 2) Memberi Izin Kepada pemohon Munarmin bin Bambang, S, untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap termohon Sri Hartati binti Surima dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
- 3) Memerintahkan Panitera Pangadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Thalak dalam perkara aquo kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepda pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan termohon

¹ Arsip Pengadilan Agama Pekanbaru. *Salinan Putusan*, Pekanbaru : PA Pekanbaru, 2011

paling lambat 30 terhitung sejak pengucapan ikrar thalak untuk dicatat dan didaftar dalam buku Register Pegawai Pencatat nikah tersebut sebagaimana mestinya.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akibat thalak kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 2. 1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5. 000. 000. (lima juta rupiah)
 2. 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3000. 000. (Tiga juta rupiah)

2. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 294/Pdt-G/2011/PA.

Pbr. Tgl. 23 April 2011. Tentang Cerai thalak antara Yefrizal SE Bin Yaskur dengan Sri Rahayu binti Kasmir sebagai tergugat yang memuat putusan dalam Konpensi:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- 2) Memberi Izin Kepada pemohon Yefrizal SE Bin yaskur untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap termohon Sri Rahayu binti Kasmir di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
- 3) Memerintahkan Panitera Pangadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Thalak dalam perkara aquo kepada pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepda pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan termohon

paling lambat 30 terhitung sejak pengucapan ikrar thalak untuk dicatat dan didaftar dalam buku Register Pegawai Pencatat nikah tersebut sebagaimana mestinya.

- 4) Menyatakan tidak dapat menerima petitum tiga primer Permohonan Pemohon tersebut.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akibat thalak kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 2. 1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 6. 500. 000, (Enam juta lima ratus ribu rupiah)
 2. 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3. 500. 000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menyatakan tidak dapat menerima petitum lima dan petitum enam rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut;

3. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0771/Pdt. G/2011/PA.

Pbr. Tgl. 25 Nopember 2011. Tentang Cerai thalak antara **Adi mukhtar bin Nurman** dengan **Rini Yohana Binti Sukirman** sebagai tergugat yang memuat putusan dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut.
2. Memberi Izin Kepada pemohon Adi Mukhtar bin Nurman untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap termohon Rini Yohana binti Sukirman di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/termohon konpensi.
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Pemohon dalam rekonpensi untuk membayar kepada penggugat dalam rekonpensi / termohon dalam konpensi tersebut sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2. 000. 000, (Dua juta Rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2. 000. 000, (Dua juta rupiah)
 - c. Nafkah 1 orang anak bernama Nadia Rahmadani (pr) sebesar Rp. 750. 000. (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

4. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru. NO. 837/Pdt. G/2011/PA.

Pbr. Tgl: 5 November 2011. Tentang Cerai Thalak Antara **Al-Fikri bin Nasir** dengan **Maimunah binti Ahmad Junaidi** sebagai tergugat yang memuat putusan dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon Al fikri bin nasir utk Menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon Maimunah binti Ahmad Junaidi didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/termohon Konpensi;

2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kpd Penggugat reconpensi berupa:

2. 1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 2. 500. 000. (Dua juta lima ratus ribu Rupiah)

2. 2 Mut'ah Sebesar Rp. 1. 500. 000. (Satu Juta lima ratus ribu rupiah)

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak bernama alfiah Safitri kepada penggugat reconpensi setiap bulannya sebesar Rp. 750. 000 (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak itu dewasa.

5. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:707/Pdt. G/2012/PA.

Pbr Tgl. 18 juni 2011. Tentang Cerai thalak antara **Samsul Bin Syamsudin** dengan **Dewi hartati Binti Suriana** sebagai tergugat yang memuat putusan mengadili:

1. Menyatakan bahwa termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon Samsul bin Syamsudin menjatuhkan thalak satu raj'i kepada termohon Dewi hartati binti Suriana di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-A;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar Thalak yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan termohon serta

dalam Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat Pemohon dan termohon dilangsungkan untuk didaftarkan/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga ini dihitung sebesar Rp. 306. 000, (Tiga ratus enam ribu rupiah).

6. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 977/Pdt. G/2011/PA.

PBR. Tentang Cerai Thalak Antara **Romi Ardi Bin Bintang Hermawan** dengan **Darmita binti Suparman** sebagai tergugat yang memuat putusan mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon Romi ardi bin Hermawan menjatuhkan thalak satu raj'i kepada termohon Darmita binti Suparman di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar Thalak yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan termohon serta dalam Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat Pemohon dan termohon dilangsungkan untuk didaftarkan/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga ini dihitung sebesar Rp. 241000, (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

7. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 567/Pdt. G/2011/PA.

Pbr. Tentang Cerai Thalak Antara **Riki Hidayat bin Zainuddin** dengan **Sabiqatur Rahmah binti Isa Ansori** sebagai tergugat yang memuat putusan mengadili:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon Riki Hidayat Bin Zainuddin menjatuhkan thalak satu raj'i kepada termo Sabiqatur Rahmah binti isa Ansori hon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kelas 1-A Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Penetapan *ikrar Thalak Perkara* yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan termohon serta dalam Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat Pemohon dan termohon dilangsungkan untuk didaftarkan/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga ini dihitung sebesar Rp. 281. 000, (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

8. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 935/Pdt. G/2011/PA.

PBR. Tentang Cerai thalak antara **Abdul Kusuma jaya Bin Winata Wahira** dengan **Mariatik binti Sukirman**. Bunyi Putusannya Adalah mengadili:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon Abdul Kusuma jaya Bin Winata Wahira menjatuhkan thalak satu raj'i kepada termoho Mariatik binti Sukirman di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kelas Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Penetapan *ikrar Thalak Perkara* kepada Pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Bukit Raya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru serta Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batam Barat Kota Batam Propinsi Kepri untuk didaftarkan/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga ini dihitung sebesar Rp. 291. 000, (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dari contoh Kasus-kasus diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada putusan no. 1-4 biaya nafkah iddah yang diputuskan Pengadilan Agama Pekanbaru tidak sama jumlah nominalnya, ini bisa disebabkan karena Hakim

berpendapat bahwa suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi, oleh sebab itu hakim dalam putusan penentuan jumlah kadar nafkah iddah yang harus dibayar oleh suami tidak sama antara putusan satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam contoh putusan 5-8 hak istri tidak dibunyikan oleh hakim dalam putusan, hal ini dikarenakan Istri waktu persidangan tidak hadir.²

B. Penerapan Pasal 149 KHI Terhadap Perlindungan Hak-Hak Istri di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dari Kasus-kasus di atas terlihat secara jelas bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu

1. Putusan Verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir.³
2. Putusan Gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.
3. Putusan Kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

² Marsyidah, Panitera Muda Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*. Tanggal 11 Februari 2013

³ Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. Ke-2, h. 119

4. Putusan acara biasa yaitu Persidangan bagi para pihak hadir dipersidangan dari awal sampai putusan, baik hadir secara terus menerus maupun tidak, maka acara ini dikenal dengan acara biasa

Tahapan persidangan biasa ini adalah sbb:

a. Upaya Perdamaian

b. Pembacaan surat gugat

Ada beberapa kemungkinan pada tahapan ini, antara lain adalah penggugat mencabut, mengubah atau menambah dan tetap mempertahankan surat gugat.

c. Jawaban Tergugat

Ada beberapa kemungkinan dalam jawaban tergugat, antara lain adalah:

- Tergugat menjawab atau menanggapi surat gugatan dengan jawaban yang isinya mengakui atau tidak membantah dan ia tidak menuntut balik
- Tergugat memberikan jawaban atau bantahan dan juga menuntut balik (Rekonvensi)
- Tergugat memberikan jawaban dua macam, yaitu jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara⁴

Dan dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan terbagi kepada 3 (tiga) macam, yaitu:

⁴ Musthofa. *Kepaniteraan peradilan agama*, Jakarta. Kencana. 2005) cet. 1. h. 91

1. Diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi “Menetapkan”.

Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut:

- a. Permohonan Thalak.
 - b. Gugat cerai karena perjanjian ta’lik thalak.
 - c. Penetapan ahli waris yang sah. Hukum
 - d. Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya.
 - e. Perkara-perkara valunter dan seterusnya.
2. Putusan Konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut.

Amar putusan konstitutif berbunyi “Menyatakan. . .” dan putusan konstitutif terdapat pada putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan gugur, ditolak dan putusan tidak diterima.
 - b. Gugatan cerai karena ta’lik thalak
 - c. Putusan Verstek
 - d. Putusan Pembatalan Perkawinan
3. Putusan Kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum k kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. ⁵

Amar putusan Kondemnatoir berbunyi “Menghukum. . .” Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yang bila ter hukum tidak mau

⁵ *Ibid.* h. 121

melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*) oleh pengadilan agama yang memutusnya.

Amar putusan kondemtnoir yang diterapkan di pengadilan agama antara lain:

- a. Penyerahan pembagian harta bersama.
- b. Penyerahan hak nafkah iddah, mut'ah.
- c. Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya.

Jadi dari keterangan di atas dapat diklasifikasikan bahwa hakim dalam memutuskan perkara cerai thalak ada yang bersifat Verstek, gugur dan kontradiktoir dan putusan biasa, sedangkan dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan putusan hakim terbagi menjadi tiga(3) macam yaitu: Diklatoir, Putusan Konstitutif dan Putusan Kondemnatoir. Dalam putusan verstek putusan hakim tidak memuat akibat cerai atau hak-hak istri sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 149 KHI, seperti dalam kasus no. 5 di atas di mana putusan hakim terhadap kasus Cerai thalak antara **Samsul Bin Syamsudin** dengan **Dewi hartati Binti Suriana** sebagai tergugat yang memuat putusan Mengadili:

1. Menyatakan bahwa termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek;

3. Memberi izin kepada pemohon Samsul bin Syamsudin menjatuhkan thalak satu raj'i kepada termohon Dewi Hartati binti Suriana di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I-A;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar Thalak yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan termohon serta dalam Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat Pemohon dan termohon dilangsungkan untuk didaftarkan/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga ini dihitung sebesar Rp. 306. 000, (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Sedangkan dalam putusan Diklatoir, hakim secara jelas memuat hak-hak istri sesuai dengan yang diamanatkan oleh pasal 149 KHI, seperti pada contoh kasus dalam no. 1 berkenaan dengan kasus cerai thalak antara **Munarmin Bin Bambang, S,** dengan **Sri Hartati Binti Surima** sebagai Tergugat yang memuat Putusan dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut.
2. Memberi Izin Kepada pemohon Munarmin bin Bambang, S, untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap termohon Sri Hartati binti Surima dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Memerintahkan Panitera Pangadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Thalak dalam perkara aquo

kepada pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan termohon paling lambat 30 terhitung sejak pengucapan ikrar thalak untuk dicatat dan didaftar usandalam buku Register Pegawai Pencatat nikah tersebut sebagaimana mestinya.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akibat thalak kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 2. 1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah)
 2. 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3000.000. (Tiga juta rupiah)

Jadi dalam Contoh kasus di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam putusan verstek istri diberikan hak-haknya sesuai yang telah diamanatkan oleh pasal 149 KHI. Hakim berpendapat bahwa "Karena Istri dalam persidangan tidak hadir maka dinamakan dengan Verstek, sedangkan kalau istri mau menuntut balik maka ia menggunakan hak Verzeet, disamping itu hakim mempunyai hak yang dinamakan ex Officio atau hak dan kewenangan dalam memutuskan sesuatu"⁶

Dilihat dari kasus-kasus diatas dapat juga disimpulkan bahwa istri belum dipenuhi hak-haknya oleh putusan hakim sesuai dengan pasal 149

⁶ Biva Yusmiarti, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*. Tgg. 11 Februari 2013.

KHI. Hakim berprinsip dalam memutuskan suatu kasus putusan cerai thalak berdasarkan keadaan diwaktu persidangan, seperti istri tidak menghadiri persidangan atau materi persidangan tidak tercukupi sehingga dalam kondisi seperti ini bisa dikatakan terabaikan isi dari pasal 149 KHI yang memuat hak-hak istri pasca perceraian yang seharusnya hakim harus melindungi hak-hak istri tersebut.

C. Analisa Kompilasi hukum Islam terhadap Pelindungan hak-hak Istri Setelah terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dari beberapa kasus yang penulis paparkan ada 4 kasus yang memuat hak-hak istri dalam bentuk rekonsvensi yang mana hak tersebut harus dipenuhi oleh suami setelah terjadi perceraian. Hak istri setelah perceraian harus berdasarkan KHI yang dimuat dalam putusan pengadilan, dalam kemudian hak istri terpenuhi apabila suami melaksanakan putusan tersebut apabila suami melaksanakannya berarti hak istri terlindungi, akan tetapi apabila suami tidak menjalani keputusan tersebut maka istri mempunyai hak untuk menuntut pada suami supaya kewajibannya dibayar dengan cara mengajukan ke Pengadilan, Selanjutnya dalam putusan no.5-8 dalam perkara verstek(tanpa kehadiran istri) yang mana tidak memuat pasal 149 KHI putusan hakim berdasarkan karena istri tidak menghadiri persidangan yang berarti tuntutan istri tidak ada dan sudah jelas dalam putusan ini tidak memuat dalam pasal 149 KHI, berarti hak istri tidak terlindungi akan tetapi istri masih punya usaha untuk mendapatkan haknya yakni dengan cara verzeet.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru hak-hak istri pasca perceraian diklasifikasikan atau dikelompokkan ada yang bersifat verstek, diklatoir, dan putusan biasa, di mana dalam putusan Verstek hakim tidak menyebutkan hak-hak istri seperti yang disebutkan dan diamanatkan oleh pasal 149 KHI, padahal dalam hukum Islam hak istri itu tidak diklasifikasikan dan dikelompokkan, maka apabila suami menceraikan istrinya, istri berhak menerima haknya sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 223

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”⁷

Dan dalam firman Allah SWT lainnya QS. At-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِبَيْتِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁸

Dalam *Komplikasi Hukum Islam* pasal 149 KHI juga disebutkan bahwa:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya yang mana istrinya masih dalam masa iddah.

⁷ Ibid h.54

⁸ Departemen Agama RI, *Loc.cit*

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talaq atau iddah wafat.⁹

Di antara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka tepat kiranya Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada isterinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang isteri terikat semata-mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan suami isteri masih terjalin isteri tidak durhaka, atau karena hal-hal yang lain menghalangi pemberian nafkah. Jadi dapat dikatakan apabila hakim memutuskan Putusan Verstek ia belum melindungi hak-hak istri sesuai dengan pasal 149 KHI, sedangkan dalam putusan diklatoir hakim melindungi hak-hak mantan istri sesuai yang diamanatkan pasal 149 KHI.

Jadi dari contoh kasus-kasus putusan yang terdahulu dapat dilihat bahwa ada putusan tersebut yang memuat hak-hak istri, dalam artian sesuai dengan

⁹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung. CV. Pustaka setia.1999)cet.I. h.180

yang tercantum dalam pasal 149 KHI, adapun contoh putusan yang sesuai dengan pasal 149 KHI tersebut antara lain adalah :

1. **Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 807/Pdt. G/2011/PA. Pbr.** Tgl. 18 Maret 2011. Tentang cerai thalak antara **Munarmin bin Bambang, S,** dengan **Sri Hartati Binti Surima** sebagai Tergugat
2. **Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 294/Pdt-G/2011/PA. Pbr.** Tgl. 23 April 2011. Tentang Cerai thalak antara Yefrizal SE Bin Yaskur dengan Sri Rahayu binti Kasmir sebagai tergugat
3. **Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0771/Pdt. G/2011/PA. Pbr.** Tgl. 25 Nopember 2011. Tentang Cerai thalak antara **Adi mukhtar bin Nurman** dengan **Rini Yohana Binti Sukirman** sebagai tergugat
4. **Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru. NO. 837/Pdt. G/2011/PA. Pbr.** Tgl: 5 November 2011. Tentang Cerai Thalak Antara **Al-Fikri bin Nasir** dengan **Maimunah binti Ahmad Junaidi** sebagai tergugat

Adapun contoh kasus yang tidak memuat hak-hak istri atau dalam artian tidak sesuai dengan pasal 149 KHI antara lain adalah :

5. **Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:707/Pdt. G/2012/PA. Pbr** Tgl. 18 juni 2011. Tentang Cerai thalak antara

Samsul Bin Syamsudin dengan **Dewi hartati Binti Suriana** sebagai tergugat

6. **Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 977/Pdt. G/2011/PA. PBR.** Tentang Cerai Thalak Antara **Romi Ardi Bin Bintang Hermawan** dengan **Darmita binti Suparman** sebagai tergugat
7. **Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 567/Pdt. G/2011/PA. Pbr.** Tentang Cerai Thalak Antara **Riki Hidayat bin Zainuddin** dengan **Sabiqatur Rahmah binti Isa Ansori** sebagai tergugat
8. **Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 935/Pdt. G/2011/PA. PBR.** Tentang Cerai thalak antara **Abdul Kusuma jaya Bin Winata Wahira** dengan **Mariatik binti Sukirman**

Dari kasus-kasus diatas terlihat secara jelas bahwa ada putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang melindungi hak istri sesuai dengan pasal 149 KHI, ini terlihat pada kasus no.1- 4, dalam contoh putusan kasus ini memuat hak-hak istri setelah terjadinya perceraian dan dalam pelaksanaanya suami menunaikan hak-haknya sehingga hak istri terlindungi sesuai dengan pasal 149 KHI, meskipun dalam keadaanya ada juga istri merelakan untuk haknya untuk tidak dibayar oleh sisuami.

Sedangkan pada contoh kasus no.5- 8 dalam putusan Verstek ini hak-hak istri tidak dimuat dalam putusan hakim, dalam perkara Verstek ini perkara cerai thalak ini tergugat tidak menghadiri persidangan sehingga

hakim tidak menetapkan hak-haknya kepada termohon(istri) dan istri tidak pula mengajukan verzeet sehingga hak-hak istri tidak terpenuhi sesuai dengan pasal 149 KHI, jadi terlihat bahwa hak-hak istri belum terpenuhi sesuai yang diamanatkan oleh pasal 149 KHI. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa apabila didalam putusan hakim tersebut tidak mencantumkan hak-hak istri , maka putusan tersebut belum melindungi hak-hak istri setelah terjadinya perceraian, karena didalam islam sendiri secara jelas disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka istri berhak menerima hak-haknya seperti tempat tinggal, maskan,kiswah, dan lain-lain. Sedangkan apabila putusan hakim memuat hak-hak istri dalam putusannya maka hal tersebut telah sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh pasal 149 KHI, dan bisa dikatakan putusan hakim telah melindungi hak-hak istri pasca perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak-hak mantan istri pasca perceraian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada yang bersifat verstek, dalam putusan Verstek ini hak-hak mantan istri tidak dimuat dalam putusan hakim, sedangkan dalam putusan hakim yang bersifat diklatoir hakim memuat hak-hak istri sesuai yang tercantum dalam pasal 149 KHI.
2. Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan kasus cerai thalak ada yang belum memuat hak-hak mantan istri sesuai dengan pasal 149 KHI dan ada yang sudah memenuhi hak-hak mantan istri sesuai dengan Pasal 149 KHI, dan terpenuhinya hak istri dalam persidangan bisa karena ia hadir dan mengikuti persidangan dengan baik dan benar, sedangkan yg belum terpenuhinya hak istri bisa disebabkan karena tidak hadir dalam mengikuti persidangan.
3. Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara cerai thalak belum sepenuhnya melindungi hak-hak mantan istri sesuai yang diamanatkan oleh pasal 149 KHI, dan penerapan pasal 149 KHI belum berjalan sesuai dengan semestinya yang seharusnya setiap hakim dalam setiap memutuskan kasus cerai thalak berpedoman pada KHI agar terlindunginya hak-hak mantan istri setelah terjadinya perceraian, karena

didalam pasal 149 KHI dengan jelas ditegaskan bahwa apabila istri diceraikan suaminya ia berhak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah, muta'ah, mahar an pembiayaan hadhanah.

B. Saran

- 1 Saran dari penulis hendaknya bagi suami ataupun istri ikutlah persidangan di Pengadilan Agama dengan baik dan benar, agar hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak dapat terpenuhi, dan khusus bagi istri dalam hal ini harus mengetahui bahwa hak-haknya setelah perceraian merupakan suatu hal yang harus diterima dari mantan suaminya, begitupun juga suami harus menunaikan kewajiban dalam melunasi hak-hak istri pasca perceraian.
- 2 Bagi suami dan Istri yang masih dalam masa iddah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan pernikahan, jadi hendaknya jadikan masa iddah masa intropeksi diri masing-masing untuk menyelamatkan keluarga dan anak-anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996

Abdul Azhim Badawi. *Fiqih nikah praktis*, Jawa Barat: Salwa Press, 2008), cet. Ke- I

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2009), Cet. Ke- I

Abdul Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syaria'h)*, (Jakarta, 2002) cet ke- II

Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet. KeII.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. Ke- XX, 2002

Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, Cet.ke1.

A.Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2006, Cet. Ke XXVII.

Abd Rasyid Salim, *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulughul Maram*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, Cet. Ke I.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, Cet. III, 2009

Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqh al-Qardhawi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta:Amzah. 2009) Cet. Ke- II

Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: GemaInsani Press,
1986 cet. Ke II

Cik Hasan Bisri, MS. , *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1989

Departemen Agama RI, *Al—Quran dan Terjemahannya* Semarang: CV Toha Putra

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Jakarta. Mujamma'al-malik fahd li
thiba'at al-mush haf. 1971

E Musthofa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*,
Yogyakarta: Kota Kembang, 1987, Cet. Ke 1.

G Fazlur Rahman, *Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992 (terjemahan)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Cet. Ke III.

Ibnu Hazim, Abu Muhammad Ali bin Ahmad, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*,
Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, tanpa tahun penerbit.

Ibnu Qadamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni*, Makkah:

Mardani. *Hukum Acara perdata peradilan agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. Ke2

Mathba'ah Al-Tijariyah, tanpa tahun penerbit.

M. Ali hasan, *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media,
2003), cet. Ke- I

M. Ali Ash-shobuni, *Pernikahan Islami*, Solo: Mumtaza, 2010.

Musthofa Diib al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, Solo Media Zikir, 2010.

Mustafa Kamal. *Fikih Sunnah*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), cet.Ke-III

Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyah, 1996, Cet. Ke 1.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), cet. Ke-I

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, Cet. Ke VI.